

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Israel merupakan negara yang paling dekat persahabatannya dengan Amerika Serikat. Sebab, hubungan Amerika Israel diibaratkan seperti kakak dan adik. Amerika selalu bertindak sebagai pelindung bagi Israel. Israel sebagai negara bentukannya, akan selalu dijaga dan dipertahankan eksistensinya. Meskipun kecaman yang diterima datang secara bertubi-tubi dan terus menerus sejalan dengan perkembangan konflik yang terjadi.

Fenomena politik internasional menunjukkan dari berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi berawal dari penyelesaian pertikaian yang ditempuh melalui cara damai dan negoisasi gagal dicapai diantara negara yang terlibat konflik. Kenyataan ini menunjukkan bahwa politik internasional pada dasarnya bersifat anarkis. Hal ini terjadi karena memang dalam politik internasional tidak ada otoritas tunggal yang dapat memaksakan penyelesaian atas konflik yang terjadi diantara berbagai negara.¹

Konflik Israel Palestina yang sudah berlangsung sejak lama belum menandakan akan berakhir dengan damai. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah organisasi internasional yang bertujuan menjaga keamanan dunia dan masyarakat internasional ternyata tidak mampu mewujudkan terjadinya penyelesaian konflik Israel Palestina secara damai. Berbagai upaya perdamaian telah dijalankan, tetapi hasilnya tetap sama bahkan konflik Israel Palestina

¹ M Amien Rais " *Politik Internasional Dewasa ini* " usaha nasional Yogyakarta, 1989 hal 4

semakin menjadi-jadi. Tujuan PBB tersebut seakan akan dikaburkan oleh ketidak sanggupan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina. Pengaruh Amerika yang begitu besar merupakan faktor yang cukup penting dari ketidaksanggupan DK PBB dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina. Amerika selalu melindungi Israel dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh DK PBB yang bersifat memberi kutukan atau kritikan kepada Israel.

Menariknya hubungan Amerika dan Israel ini menjadi alasan penulis mengambil judul tersebut diatas serta untuk mengungkap seberapa besar pengaruh Amerika-Israel di PBB sehingga solusi konflik yang diambil selalu mengalami kegagalan.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar :

1. Untuk menambah wawasan mengenai organisasi internasional khususnya PBB terutama dalam upaya penyelesaian konflik Israel Palestina.
2. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan Amerika dan Israel.
3. Untuk melihat sejauh mana keterlibatan Amerika Serikat (AS) di PBB khususnya dalam penyelesaian konflik Israel Palestina.
4. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapat selama kuliah.

5. Tujuan lain adalah untuk memperoleh derajat sarjana hubungan internasional pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Istilah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau *united nation* pertama kali dipergunakan pada tanggal 1 Januari 1942, atas usul presiden Amerika F.D.Roosevelt. Namun pengertian istilah tersebut pada waktu itu berbeda dengan pengertian seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada waktu itu yang dinamakan PBB adalah tempat berkumpulnya 26 negara di Washington, kemudian bertugas mengeluarkan suatu deklarasi yang berdasarkan pada pokok-pokok piagam Atlantik dan bertujuan untuk memobilisir semua kekuatan militer dan ekonomi untuk memenangkan perang melawan hitlerisme Jerman, fasisme Itali dan militerisme Jepang. Jadi PBB pada waktu itu adalah bertujuan untuk memenangkan perang. Sedang PBB yang resmi dibentuk pada tahun 1945 adalah sebaliknya yaitu untuk tujuan perdamaian, bukan untuk perang. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa PBB tahun 1942 lebih merupakan koalisi peperangan. Namun demikian ternyata deklarasinya telah mampu menjangkau jauh kedepan yaitu kerjasama untuk kepentingan perdamaian dunia.

Fungsi mediator yang diemban PBB diharapkan dapat menjadi katalisator tentang arti dan fungsi lembaga internasional untuk menyelesaikan

pertikaian, baik berupa perang atau konflik regional seperti yang tercantum dalam pasal 1 tentang tujuan yang dirumuskan PBB² yang menyatakan :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan menggunakan tindakan-tindakan kolektif dan cara-cara penyelesaian secara damai.
2. Memajukan hubungan persahabatan diantara bangsa-bangsa.
3. Mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan untuk meningkatkan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan dasar kemerdekaan tanpa perbedaan atas ras, sex, bahasa dan agama.
4. Menjadikan PBB sebagai pusat dari pada keselarasan tindakan bangsa-bangsa didalam usahanya untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan fungsi dari PBB tersebut.

Untuk mencapai tujuan itu, para anggota PBB wajib bekerjasama dengan sukarela untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut.

Diantara keenam organ pokok PBB, dewan keamanan merupakan organ pokok yang paling penting dan memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menjalankan tugas PBB demi mencapai maksud dan tujuan organisasi yaitu perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan keamanan merupakan bentuk dasar dari atau persekutuan para pemenang perang dunia II yang merencanakan bahwa dewan keamanan

² Ilien Harlina, Dra, M.si, "Perserikatan Bangsa-Bangsa", dalam diktat kuliah Orgns dan Adm International (Yogyakarta : Fisipol, HI-UMY, 2002) hal 16.

merupakan sebuah badan tertinggi didalam organisasi dengan tugas utama mempertahankan keamanan dan perdamaian international. Kerjasama antar negara-negara besar yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Republik Tiongkok dan Perancis ³, dipandang sangat penting untuk tujuan ini. Maka mereka merasa berhak mendapatkan status istimewa dalam lembaga pengambilan keputusan tersebut, yang kemudian ditetapkan dengan memberikan status sebagai anggota tetap di DK dengan memberikan hak istimewa berupa hak veto kepada kelima negara tersebut.

Sejak perang dunia II berakhir, PBB merupakan satu-satunya organisasi international yang universal dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan international. Sampai saat ini kehadiran PBB masih diwarnai oleh gejala politik international seperti konflik regional di Timur Tengah yaitu konflik antara Israel dan palestina yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Palestina dan Israel merupakan sebagian kawasan di Timur Tengah yang terlibat konflik. Jalur Gaza dan Tepi Barat merupakan daerah yang diperebutkan, masing-masing pihak mengklaim bahwa daerah-daerah tersebut adalah milik mereka.

Palestina adalah perjuangan yang sangat panjang, baik secara fisik maupun secara diplomatik. Secara fisik sudah jelas. Konflik Israel Palestina yang sudah terjadi sejak tahun 1947 belum menandakan akan berakhir dengan kata lain, hingga saat ini Israel tetap belum mengizinkan pembentukan negara Palestina berdaulat.

³ Pada tahun 1971 keanggotaan Republik Tiongkok digantikan oleh Republik Rakyat Cina (RRC), pada tahun 1991 keanggotaan Uni Soviet digantikan Rusia.

Berbagai upaya telah ditempuh, mulai dari digelarnya perundingan Oslo tahun 1993. Berdasarkan perundingan tersebut, tahun 1994 Israel menarik mundur pasukannya dari jalur Gaza dan mengakhiri masa kependudukannya selama 27 tahun. Namun kesepakatan Oslo tersebut sekaligus menguak adanya segmen-segmen masyarakat yahudi yang belum siap menerima proses perdamaian Timur Tengah. PM Israel Yitzhak Rabin yang menggagas kesepakatan Oslo itu, akhirnya tewas ditangan ekstremis yahudi Yigal Amir pada November tahun 1995. Kemudian digantikan oleh Benyamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap Palestina⁴

Tahun 1996, Israel kembali menduduki jalur Gaza dan tepi Barat, dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB no 242 yang intinya tidak dibenarkan menduduki daerah melalui peperangan serta meminta Israel menarik pasukannya dari tanah-tanah yang diduduki. Tetapi sama halnya dengan resolusi-resolusi terdahulu, Israel tidak mengindahkan resolusi tersebut.

Pada pemerintahan Benyamin Netanyahu ini, proses perdamaian mengalami kemacetan hampir selama dua tahun hingga tercapai kesepakatan Wye River pada Oktober 1998 yang berisi tentang pembagian wilayah bagian Israel dan Palestina dan mengecam Israel untuk menarik mundur pasukannya. Kesepakatan Wye River tersebut tidak dilaksanakan dan bahkan dibekukan oleh PM Netanyahu. Selanjutnya diadakan perundingan Camp David tahun 2001, tetapi perundingan tersebut juga tidak membuahkan hasil. Oktober 2001 krisis di Timur Tengah semakin memanas ditandai dengan bentrok terbuka antara

⁴ Musthafa Abd.Rahman, *Dilema Israel "antar krisis politik dan perdamaian"*, (Kompas : 2002) hal pendahuluan

penduduk sipil Palestina dengan tentara Israel dan pengrusakan terhadap kantor dan otoritas Palestina.

Untuk meredakan ketegangan di wilayah pendudukan Palestina, pada Juni 2001 diadakan kesepakatan gencatan senjata atas prakarsa AS, tetapi gencatan senjata kembali gagal dilaksanakan. Akibatnya ketegangan yang semakin memuncak tak bisa dihentikan. Aksi balas membalas terus terjadi tanpa ada pihak yang mau mengalah atau menenangkan diri.

Puncak ketegangan terjadi ketika Israel dengan sangat tega membunuh pemimpin Hamas⁵ Syeh Ahmad Yassin sekaligus penggantinya, Abdel Aziz Rantissi. Tindakan tak berprikemanusiaan itu mengundang kecaman dari seluruh dunia.

Sidang umum (SMU) PBB pun mengeluarkan kutukan keras kepada Israel. Namun kutukan 191 negara dan bangsa yang tergabung dalam PBB itu sama sekali tak menyentuh nurani Israel. Kemudian, DK PBB pun mengeluarkan resolusi mengutuk tindakan brutal Israel tersebut. Padahal kutukan dewan keamanan akan lebih berarti dibandingkan dengan kutukan SMU PBB. Pasalnya, resolusi dewan keamanan bersifat mengikat (*binding*), sedangkan sidang umum tidak mengikat (*non-binding*). Dengan kata lain, resolusi dewan keamanan bisa melahirkan sanksi bagi negara yang tidak mengindahkan keputusan tersebut. Sedangkan keputusan SMU PBB hanyalah memiliki bobot sejauh ikatan moral.⁶

⁵ Gerakan anti kekerasan yang didirikan oleh pemuda-pemuda Palestina untuk menentang Israel melalui gerakan bom syahid

⁶ Kompas, 29 september 2004

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina telah menyebabkan kemurkaan dunia. Seluruh dunia melihat bahwa sebagai sebuah organisasi internasional, PBB tidak lagi mewakili komunitas internasional.

Peran Dewan Keamanan dalam mengatasi konflik-konflik regional sebenarnya bisa dilihat keberhasilannya misalnya dalam penyelesaian penghentian perang Iran-Irak, perang Arab-Israel 1973, penghentian perang saudara di Korea. Tetapi keberhasilan yang dicapai hanya sebatas mengesahkan resolusi, upaya gencatan senjata. Walaupun tujuan akhir dari peran Dewan Keamanan tersebut tidak terlaksana. Dalam kasus ini, sulit untuk mengukur keberhasilan Dewan Keamanan dalam melaksanakan perannya sebagai penjaga perdamaian dan keamanan internasional, karena Dewan Keamanan PBB belum mampu menyelesaikan konflik secara tuntas. Ini dapat dilihat dari upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Konflik Israel-Palestina merupakan ujian bagi PBB untuk memperlihatkan efektifitas PBB dalam menyelesaikan masalah internasional. Ketidaksanggupan PBB khususnya Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina menjadi perhatian utama bagi seluruh komunitas internasional atas harapan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh PBB.

Ketidakseimbangan kekuatan ditubuh PBB merupakan kelemahan yang menyebabkan kegagalan Dewan Keamanan dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Tetapi untuk saat ini PBB tetap merupakan salah satu harapan dari terciptanya perdamaian dan keamanan internasional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji disini adalah : **faktor-faktor apa saja yang menghambat PBB dalam upaya penyelesaian konflik Israel Palestina.**

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Karena penelitian ini bersifat eksploratif berdasarkan studi kepustakaan, maka dasar-dasar teoritik yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dikembangkan melalui konsep-konsep deskriptif.

Efektifitas organisasi

Efektifitas organisasi merupakan sebuah proses yang bersinambungan dan bukan sebagai keadaan akhir dari sebuah organisasi. Untuk menjelaskan efektifitas dari sebuah organisasi terdapat faktor-faktor yang menyokong keberhasilan akhir suatu organisasi⁷, antara lain:

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Mengenai struktur, meningkatnya efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan.

2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek yang walaupun agak berbeda, namun agak berhubungan. Yang pertama adalah lingkungan ekstern

⁷ Richard M Steers , *Organizational Effectiveness*, terjemahan oleh Magdalena Jamin (erlangga 1998) hal 9-10

yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi. Yang kedua adalah lingkungan intern. Lingkungan ini pada umumnya sebagai iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja, khususnya atribut yang diukur pada tingkat individual (sikap kerja, prestasi).

3. Karakteristik Negara

Para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang cukup penting atas efektifitas karena perilaku merekalah yang akan memperlancar atau merintanginya tercapainya tujuan organisasi. Negara yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Variasi tersebut sering menyebabkan perilaku wakil negara berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan disatu lingkungan kerja yang sama.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa dalam tubuh PBB terdapat 6 organ pokok yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah International, Dewan sosial ekonomi, Dewan Perwalian dan Sekretariat. Masing-masing organ bertanggungjawab terhadap tujuan dari organ tersebut. Penentuan negara-negara untuk kemudian ditetapkan sebagai salah satu anggota organ PBB harus benar-benar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki negara tersebut. Apabila terdapat kekeliruan didalam menentukan negara yang akan ditetapkan dalam organ PBB, hal ini akan berpengaruh pada proses kerja selanjutnya di dalam menangani masalah international.

Seperti adanya hak istimewa berupa hak veto pada 5 anggota tetap Dewan Keamanan. Apabila 5 negara pemegang veto itu tidak menggunakan haknya, maka keputusan PBB akan berjalan lancar, tetapi apabila salah satu negara

pemegang veto menggunakan haknya, maka Dewan Keamanan tidak bisa mengambil keputusan.

Komposisi seperti itu, dapat menyebabkan setiap keputusan yang diambil, apabila bertentangan dengan kepentingan negara pemegang hak veto maka keputusan itu tidak dapat dijalankan. Ini berarti tidak adanya sentralisasi pengambilan keputusan. Dalam artian, setiap keputusan yang dirumuskan oleh seluruh anggota PBB harus mendapatkan persetujuan dari ke lima anggota tetap Dewan Keamanan.

PBB sebagai badan dunia yang diharapkan berada diatas semua pihak kini telah semakin tidak berdaya mempertahankan independensinya. Sehebat apapun wewenang PBB, tidak akan bisa untuk menjalankan sebuah keputusan, termasuk resolusi. Karena pelaksanaannya tidak hanya membutuhkan keputusan tetapi juga butuh sarana. Ini merupakan faktor ekstern lingkungan organisasi PBB. Dimana markas besar PBB terletak di New York, Amerika. Secara tidak langsung itu akan mempengaruhi manajerial PBB. Karyawan PBB sebahagian besar berkebangsaan Amerika yang akan memepengaruhi kebijakan yang diambil PBB.

Faktor lain yang cukup penting dalam pencapaian efektifitas sebuah organisasi adalah prilaku dari negara anggota PBB itu sendiri. Apabila setiap negara anggota PBB memiliki keterikatan yang kuat dengan PBB, dalam artian setiap negara anggota berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pencapaian tujuan organisasi maka PBB akan selalu menjalankan fungsinya dengan baik.

Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional itu adalah : Politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara didalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional (*Foreign policy as a strategy or planned course of action developed by the decision makers of state vis a vis or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest*). Adapun elemen – elemen dari kepentingan nasional menurut Roy Olton dan Jack C Plano mencakup pertahanan diri (*self preservation*), kemandirian (*independence*), integritas teritori (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*) dan kemakmuran ekonomi (*economic well – being*).⁸

Dalam berhubungan dengan negara lain yang diimplementasikan melalui politik luar negeri, setiap negara berlandaskan dari kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri digunakan sebagai salah satu instrument guna mencari atau memperluas kekuasaan maupun pengaruh sebuah negara terhadap negara lain.

Untuk mencapai tujuan nasional yang diaplikasikan melalui politik luar negeri, menurut Morgenthau kita perlu mempertimbangkan unsure kekuatan nasional yang dimiliki. Unsur kekuatan nasional meliputi : geografi, sumber-sumber alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, dan kualitas pemerintahan.⁹

⁸ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, holt, Rinehart & Winston, USA, 1967, p 127

⁹ Hans J Morgenthau, *Politics Among Nations*, disunting oleh Frans Bona Sihombing, *Ilmu Politik Internasional (teori sistem dan konsep)*, Ghalia Indonesia, 1984, p 111-128

Kepentingan nasional bersumber dari seluruh system nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap negara dalam melaksanakan politik luar negeri, dimana ia tak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri dari suatu negara.¹⁰

Dalam kasus konflik Israel-Palestina, Amerika sebagai negara yang sangat berkepentingan dalam konflik tersebut berusaha memperkuat politik luar negerinya di Timur Tengah. Sesuai dengan elemen – elemen dari kepentingan nasional yang telah dijelaskan oleh Roy Olton dan Jack C Plano, Amerika Serikat memiliki kepentingan *military security* yang sekaligus menjadi *economic well – being*. Selama ini, Amerika merupakan salah satu negara adidaya yang memiliki Industri Persenjataan yang sering disebut MIC (Military Industrial Complex). Secara umum yang sangat ditakutkan Amerika Serikat adalah produsen industri militer negara lain. Dalam artian, MIC milik Amerika Serikat ini dijadikan sebagai spionase – spionaase bagi keamanan militer internal Amerika. Dimana, jika negara lain mampu membuat MIC yang lebih besar dari Amerika, maka dikhawatirkan hasil produksinya itu untuk menyerang Amerika Serikat. Selain itu salah satu sumber pemasukan pemerintah Amerika Serikat adalah dari hasil produksi MIC. Hal ini berarti ketika perang di Timur tengah berakhir, maka MIC milik Amerika ini tidak dapat mendistribusikan produknya dan akan

¹⁰ Dahlan Nasution, *Konsep Politik Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, p 32

mengurangi income pemerintah serta mengganggu perekonomian Amerika pada umumnya.

Konsep Power

Power, menurut K. J. Holsti,¹¹ didefinisikan sebagai sebuah konsep multidimensional yang terdiri dari (1) tindakan yang dengan itu satu faktor mempengaruhi aktor lain ; (2) kemampuan yang digunakan untuk tujuan mempengaruhi actor lain ; (3) tanggapan yang didapat. Dengan Holsti mengkonsepsikan power sebagai *A means to an end* (sarana mencapai tujuan), meskipun sebagian pemimpin politik akan mencari pmlaty engaruh sebagai tujuan itu sendiri, sebagaimana sebahagian orang menghargai uang tidak karena apa yang bisa dibeli oleh uang tetapi demi uang itu sendiri. Singkatnya, Holsti mendefinisikan power sebagai "*the general capacity of a state control the behaviour of others*" (kemampuan umum suatu Negara untuk mengontrol prilaku negara-negara lain. Sedangkan dalam teori Morgenthou kekuasaan (power) adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi dan mengontrol fikiran dan tindakan orang lain.¹² Dan menurut Theodore A Coulumbis dan James H Wolfe kekuatan mempunyai tiga unsur utama yaitu :

Unsur pertama adalah kekuatan (*force*) yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit, misalnya aktor A menggunakan alat-alat paksa seperti

¹¹ James E. Dougherty and Robert L Pfaltzgraff, Jr, "*Teori-teori Hubungan Internasional*", terjemahan oleh M Amien Rais, Harwanto Dahlan, Tulus Warsito, 1996 hal 109

¹² *Teori-Teori Hubungan Internasional*, dalam editor terjemahan Harwanto-Dahlan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP, UMY

militer, ekonomi, dan lain-lain terhadap aktor B untuk mencapai tujuan-tujuan politik aktor A

Unsur kedua adalah pengaruh (*influence*) yang didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi, jenis kekuatan, oleh aktor A untuk menjaga atau mengubah perilaku aktor B dengan cara yang sesuai dengan persepsi atau keinginan aktor A

Unsur ketiga adalah paksaan (*authority*) yang didefinisikan sebagai kerelaan aktor B untuk memenuhi instruksi dan perintah yang dikeluarkan oleh aktor A, yang dipelihara dalam persepsi B mengenai aktor A

Penggunaan suatu unsur power tidak selalu sama efektifnya atau sama fungsinya dalam semua situasi. Suatu negara mungkin lemah dalam suatu situasi atau salah satu unsur tetapi kuat dalam situasi lain atau salah satu atau lebih unsur lainnya.

Kekuasaan pada umumnya diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang (Negara) lain. Ia merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungan internasional. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer saja, tetapi juga faktor-faktor ekonomi, politik, teknologi, psikologi, sangat penting. Dalam suatu sistem internasional yang anarki, kekuasaan relatif dari setiap negara menjadi penting dan bahkan menentukan. Negara pada dasarnya tidak bersedia kehilangan sebagian dari kekuasaannya, apalagi kalau sebagian kekuasaan yang hilang itu memberikan keuntungan-keuntungan baginya, kecuali jika ia menerima imbalan yang dinilainya layak atau lebih menguntungkan.

Dengan demikian, dalam mendirikan dan memanfaatkan organisasi-organisasi internasional perlu diperhitungkan terutama, negara-negara besar biasanya sangat enggan menyerahkan keuntungan-keuntungan dari kekuasaan yang dimilikinya dan berusaha agar organisasi itu dibentuk dan disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin berlanjutnya keadaan yang menguntungkanannya itu. Sebaliknya negara-negara yang relatif lemah dan kecil, yang secara otomatis berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dalam hubungannya dengan negara-negara besar, akan berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbesar kekuasaan relatifnya dengan memanfaatkan organisasi internasionalnya itu. Dua tuntutan yang saling bertentangan itu memerlukan suatu akomodasi yang cukup adil agar organisasi internasional itu dapat berfungsi dengan efektif. Ini berarti bahwa pengaturan-pengaturan struktural dan prosedural, terutama mengenai cara pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang ada antara kekuasaan dan kepentingan dari para anggotanya.

Amerika tidak menjadi negara yang paling kuat di dunia jika Amerika Serikat tidak menjadi pemimpin dan tidak mempunyai alat-alat kepemimpinan. Untuk menjaga kepemimpinannya Amerika Serikat harus selalu siap mendukung diplomasinya dengan ancaman dengan kredibilitasnya yang tinggi.

PBB pada dasarnya adalah ciptaan negara-negara besar yang muncul pada akhir Perang Dunia II. Oleh sebab itu, sejak semula hal ini merupakan kendala bagi PBB untuk betul-betul berperan sebagai aktor yang independen dalam politik internasional. Posisi negara-negara besar itu karena memang

tanggung jawabnya yang besar atas perdamaian dunia dibanding dengan negara-negara lainnya, tercerminkan dalam veto mereka dalam Dewan Keamanan. Ini berarti bahwa PBB hanya dapat berperan secara efektif untuk mencegah atau menumpas kekerasan dalam konflik-konflik yang secara tidak langsung melibatkan negara-negara besar. Bahkan dalam hal-hal yang sedemikianpun PBB hanya bisa bertindak jika semua negara besar sepakat, yaitu jika tidak satupun diantara mereka menggunakan hak vetonya.

F. Hipotesa

Dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang ditetapkan maka dapat diambil hipotesa sebagai berikut :

Ketidaksanggupan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina disebabkan karena :

- 1. Tidak adanya keseimbangan kekuatan di tubuh PBB**
- 2. Adanya tekanan Amerika yang begitu besar yang menjadikan PBB tidak bisa berlaku adil dan seimbang**
- 3. Amerika Serikat tidak menginginkan konflik Israel-Palestina berakhir karena adanya kepentingan-kepentingan dalam konflik tersebut.**

G. Jangkauan Penelitian

Sesuai dengan tema dan melihat permasalahan yang ada, maka pembahasan skripsi ini difokuskan pada kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah organisasi internasional dalam penyelesaian konflik Israel Palestina.

Fokus kajian akan ditekankan pada periode 1993 yang merupakan babak baru dari konflik Israel Palestina setelah konflik Arab Israel sampai tahun 2003 yang merupakan tahun keluarnya inisiatif damai Geneva sebagai pendukung peta perdamaian.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisa kualitatif, dalam artian mengumpulkan data dan informasi melalui studi pustaka, dari berbagai sumber tertulis seperti buku, majalah, makalah, surat kabar, jurnal berita, internet dan catatan-catatan lainnya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan fasilitas perpustakaan, sehingga data-data yang dikumpulkan bersifat sekunder.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka tulisan ini akan dibagi menjadi 5 bagian atau 5 bab. Secara ringkas sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Berisi pendahuluan, yang diawali dengan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai deskripsi umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, meliputi Organ-Organnya termasuk Dewan Keamanan, prosedur penggunaan hak veto dan pemungutan suara di PBB.. Efektifitas Dewan

Keamanan Serta membahas landasan PBB dalam menyelesaikan konflik internasional.

Bab III menjelaskan mengenai gambaran umum negara Israel dan Palestina. Latar belakang konflik Israel-Palestina serta membahas mengenai upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina .

Bab IV menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menghambat PBB dalam menyelesaikan konflik Israel palestina, yaitu ketidakseimbangan kekuasaan di tubuh PBB, tekanan Amerika Serikat di PBB, hubungan Israel dan Amerika Serikat serta kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina.

Bab V berisi kesimpulan dari keseluruhan bab-bab sebelumnya.